

**PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA  
MASYARAKAT DALAM MENGEMBANGKAN DESA  
WISATA TARUMAJAYA DI KABUPATEN BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT**

Diajukan untuk melengkapi persyaratan dalam

Menyelesaikan studi program diploma IV



Disusun Oleh:

Rosemery Pauline Rumayar Puluhulawa

201923202

**PROGRAM STUDI DESTINASI PARIWISATA  
JURUSAN KEPARIWISATAAN  
POLITEKNIK PARIWISATA NHI BANDUNG  
2023**

# LEMBAR PENGESAHAN

JUDUL PROYEK AKHIR  
PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA MASAYARAKAT DALAM MENGEMBANGKAN DESA WISATA  
TARUMAJAYA DI KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

NAMA : Rosemery Pauline Rumayar Puluhulawa  
NIM : 201923202  
JURUSAN : Kepariwisataan  
PROGRAM STUDI : Destinasi Pariwisata

Pembimbing Utama,



Sugeng Hermanto, S.Sos., M.M.Par.

NIP.19581212 199303 1 001

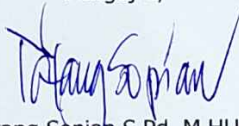
Pembimbing Pendamping,



Drs. Asip Rosadi, M.A.P


NIP.19630717 199903 1 001

Penguji I,



Tatang Sopiah, S.Pd., M.HUM.  
NIP. 1970100 920065 1 001

Penguji II,



Eka Paramita Marsongko, A.Par., M.SC.  
NIP. 19601222 198503 2 001

Bandung, Agustus 2023

Mengetahui,

Kabag. Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerja Sama

Menyetujui,

Direktur Politeknik NHI Bandung

**Ni Gusti Made Kerti Utami., BA., MM.Par CHE.**  
19710316 199603 2 001



**Andar Danova L. Goeltom, S.Sos., M.Sc., CHE**  
NIP. 19710506 199803 1 001

## PERNYATAAN MAHASISWA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Rosemery Pauline Rumayar Puluhulawa  
Tempat/Tanggal Lahir : Manado, 28 Mei 2001  
NIM : 201923202  
Program Studi : Destinasi Pariwisata  
Jurusan : Kepariwisataan

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir/Proyek Akhir yang berjudul:

**PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA MASYARAKAT DALAM MENGEMBANGKAN DESA  
WISATA TARUMAJAYA DI KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT**

ini adalah merupakan hasil karya dan hasil penelitian saya sendiri, bukan merupakan hasil penjiplakan, pengutipan, penyusunan oleh orang atau pihak lain atau cara-cara lain yang tidak sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku di Politeknik Pariwisata NHI Bandung dan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan kecuali arahan dari Tim Pembimbing.

2. Dalam Tugas Akhir/Proyek Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang atau pihak lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber, nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dalam naskah Tugas Akhir/Proyek Akhir ini ditemukan adanya pelanggaran atas apa yang saya nyatakan di atas, atau pelanggaran atas etika keilmuan, dan/atau ada klaim terhadap keaslian naskah ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Politeknik Pariwisata NHI Bandung ini serta peraturan-peraturan terkait lainnya.
4. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 19 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Rosemery Pauline Rumayar Puluhulawa

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, pemberi kebijaksanaan karena dengan berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Proyek Akhir yang berjudul “Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat dalam mengembangkan Desa Wisata Tarumajaya di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat” dengan baik.

Penelitian Proyek Akhir ini merupakan kegiatan sebagai syarat dalam rangka penyelesaian studi yang merupakan Proyek Akhir berbentuk penelitian sebagai bentuk kegiatan akademik bagi mahasiswa semester 8 program studi Manajemen Destinasi Pariwisata, Jurusan Kepariwisata, Politeknik Pariwisata NHI Bandung.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung pelaksanaan penelitian ini:

1. Bapak Andar Danova L. Goeltom, S.Sos, M.Sc selaku Direktur Politeknik Pariwisata NHI Bandung.
2. Ibu Dr. E.R. Ummi Kalsum, M.M.Par.,CHM.,CHRMP., selaku kepala bagian
  1. Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama Politeknik Pariwisata
  2. NHI Bandung.
3. Ibu Endah Trihayuningtyas, S.Sos, MM.Par Selaku ketua Jurusan Kepariwisata Politeknik Pariwisata NHI Bandung.
4. Ibu Wisi Wulandari, S.ST.Par., M.M.Par Selaku Ketua Program Studi Manajemen Destinasi Pariwisata Politeknik Pariwisata NHI Bandung.

5. Bapak Sugeng Hermanto, S.Sos., M.M.Par Selaku Pembimbing Utama dalam proses penyusunan Proyek Akhir
6. Bapak Drs. Asep Rosadi M.A.P Selaku Pembimbing Pendamping. dalam proses penyusunan Proyek Akhir
7. Ibu Dr. Beta Budisetyorini, M.Sc, selaku .Dosen Pembimbing Akademik.
8. Seluruh dosen dan staf Politeknik Pariwisata NHI Bandung.
9. Bapak Ahmad Iksan, SE selaku Kepala Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari, Pak Sekdes Sandi Ramdhani dan seluruh perangkat Desa Tarumajaya.
10. Seluruh lembaga masyarakat di Desa Tarumajaya; (BUM Desa, TP.PKK, Pokdarwis, Karang Taruna dan MUI) beserta masyarakat desa.
11. Orang tua Peneliti, Ibu Monalisa dan Bapak Rony yang mendampingi Peneliti dalam mengerjakan Proyek Akhir
12. Bapak Tomy, TL Program P3PD Kemendesa PDTT yang mendukung dalam penguatan materi substansi pengembangan desa
13. Tim PPW (Pemerataan Pembangunan Wilayah) yang mendukung dalam proses penyusunan Proyek Akhir
14. Sahabat penulis Ranisa Putri, Melinda Ade, Salsabilla Fitriani, Elisabeth Elnora, dan Khofifah Azmi, sebagai teman seperjuangan dalam penulisan Proyek Akhir
15. Maurice West sebagai salah satu motivator dengan musiknya saat Peneliti mengerjakan Proyek Akhir
16. Seluruh Teman seperjuangan Angkatan 2019 Politeknik Pariwisata NHI Bandung khususnya Jurusan Kepariwisata prodi Destinasi Pariwisata

Demikian Proyek Akhir ini dibuat, semoga dapat memberikan manfaat dan dampak positif sehingga dapat dijadikan bahan rekomendasi dan bersifat solutif serta dapat diaplikasikan oleh seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat lokal. Atas bantuan dan perhatian yang telah diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Bandung, Agustus 2023

Peneliti

## **ABSTRACT**

*In the context of national economic recovery, the Proud Travel Program in Indonesia has been launched at the end of 2022 to encourage the love of the Indonesian people as domestic tourists visiting domestic destinations, including tourist villages such as Tarumajaya in Kertasari District, Bandung Regency.*

*The development of Tarumajaya Tourism Village has encountered obstacles in terms of the management of existing Community Institutions is still not optimal among them the financial management has not been well organized such as there has been no distribution of compensation to members of the institution, the composition and role of membership in the institution is still unclear, and there is still no official formation of a Tourism Awareness Group regulated in a regulation or regulation of Tourism Villages.*

*This research uses descriptive research method qualitative approach. Participants consisted of: Village Head, Village-Owned Enterprises (BUM Desa) Wa Hyang, Representatives of the Family Welfare Mobilization Team (TP. PKK), Tourism Awareness Group (Pokdarwis), Karang Taruna, religious institution of the Indonesian Ulema Council (MUI) Tarumajaya Village. With observational data collection techniques, interviews, documentation,*

*Based on the research, several recommendations were obtained, namely Structural Training and institutional model making, Making Operational Standards, Making a regulation that regulates pokdarwis, Making the structure or main arrangement of the tasks given, Training and fostering technical knowledge of institution managers, Financial Management Training and Creating a Tourism Village Management Institute (PDW) that will assist in the process of synchronization, coordination, and collaboration.*

**Keywords:** *Community Based Tourism, Community Institutions, Tourism Villages, Village BUM, PKK, Karang Taruna, Pokdarwis, MUI Desa*

## ABSTRAK

Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional telah diluncurkan Program Bangga Berwisata di Indonesia pada akhir tahun 2022 untuk mendorong kecintaan masyarakat Indonesia sebagai wisatawan nusantara mengunjungi destinasi di dalam negeri termasuk desa wisata seperti Tarumajaya di Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung.

Pengembangan Desa Wisata Tarumajaya menemui kendala dalam hal pengelolaan Lembaga Masyarakat yang ada masih belum maksimal diantaranya manajemen keuangannya belum terorganisir dengan baik seperti belum ada pembagian kompensasi kepada anggota lembaga, susunan dan peran keanggotaan dalam lembaga masih belum jelas, dan masih belum terbentuknya Kelompok Sadar Wisata secara resmi yang di atur dalam suatu regulasi atau peraturan Desa Wisata.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif pendekatan kualitatif. Partisipan terdiri dari: Kepala Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Wa Hyang, Perwakilan Tim Penggerak Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK), Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Karang Taruna, lembaga keagamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Desa Tarumajaya. Dengan Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi,

Berdasarkan dari penelitian diperoleh beberapa hasil rekomendasi yaitu Pelatihan Struktur dan pembuatan model kelembagaan, Membuat Standard Operasional, Membuat suatu regulasi yang mengatur pokdarwis, Membuat susunan atau tataan pokok tugas yang diberikan, Pelatihan dan pembinaan pengetahuan teknis pengelola lembaga, Pelatihan Manajemen Keuangan dan Membuat lembaga Pengelolaan Desa Wisata (PDW) yang akan membantu dalam proses sinkronisasi, koordinasi, dan kolaborasi.

**Keywords:** *Community Based Tourism*, Kelembagaan Masyarakat, Desa Wisata, BUM Desa, PKK, Karang Taruna, Pokdarwis, MUI Desa

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN MAHASISWA .....	v
ABSTRAK .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Kajian Teori .....	9



B. Kerangka Pemikiran.....	26
BAB III.....	27
METODE PENELITIAN.....	27
A. Rancangan Penelitian.....	27
B. Partisipan dan Tempat Penelitian.....	27
C. Pengumpulan Data.....	28
D. Analisis Data.....	30
E. Pengujian Keabsahan Data.....	31
F. Jadwal Penelitian.....	32
BAB IV.....	34
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Hasil Penelitian.....	34
12. Kompensasi ( <i>Salary</i> ).....	74
B. Pembahasan.....	85
BAB V.....	100
SIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	100
A. Simpulan.....	100
B. Rekomendasi.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	115
LAMPIRAN.....	92

## DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1	Contoh Struktur Organisasi Fungsional .....	10
2	Contoh Struktur Organisasi Proyek.....	11
3	Contoh Struktur Organisasi Matriks.....	13
4	Contoh Struktur Organisasi Line.....	14
5	Kerangka Pemikan .....	26
6	Analysis Interactive Model .....	30
7	Peta Wilayah Desa Tarumajaya .....	35
8	Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Tarumajaya .....	39
9	Kedadaan Desa Tarumajaya .....	45
10	AGP Camping Ground .....	46
11	Paesan Camping Ground .....	47
12	Pakawa Camping Ground.....	48
13	Situ Cisanti dan Pabrik teh .....	52
14	Anugerah Desa Wisata Terbaik Kategori Rintisan pada tahun 2022 .....	54
15	Bandung Nomor 556/KEP.770-DISBUDPAR Tahun 2022 tentang Penetapan Desa Wisata Di Wilayah Kabupaten Bandung.....	55

16	Informan terkait dengan profil dan sejarah .....	56
17	Peneliti melakukan diskusi dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa .....	56
18	Susunan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Tarumajaya .....	62
19	Susunan Pengurus Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) .....	64
20	Susunan Pengurus Karang Taruna .....	65
21	Susunan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) .....	66
22	Susunan PKK .....	66
23	Informan BUM Desa Nama: Entep Sutiaman (Direktur BUM Desa) .....	77
24	Informan Majelis Ulama Indonesia .....	79
25	Informan 1 Karang Taruna .....	81
26	Informan 2 Karang Taruna .....	81
27	Informan TP.PKK .....	82
28	Informan POKDARWIS .....	83
29	Bersama Ke-5 Lembaga Masyarakat Yang Ada .....	87
30	Diagram Venn Pola Hubungan Pengelola Desa Wisata (PDW) .	88
31	Kantor sekretariat Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) .....	95
32	Kantor Sekretariat Karang Taruna .....	96
33	Kantor sekretariat Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) .....	96

34	Kantor sekretariat MUI .....	97
35	Pengelolaan Desa Wisata .....	117

## DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1	Jadwal Penelitian.....	32
2	Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga di Desa Tarumajaya.....	37
3	Jumlah Lembaga Pendidikan.....	38
4	Lembaga Kemasyarakatan .....	40
5	Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat .....	97

**PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA MASYARAKAT DALAM  
MENGEMBANGKAN DESA WISATA TARUMAJAYA DI KABUPATEN BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT**

**Rosemery Pauline Rumayar Puluhulawa, Sugeng Hermanto, Asep Rosadi**

Politeknik Pariwisata NHI Bandung

Email: [Rosemery.pauline2@gmail.com](mailto:Rosemery.pauline2@gmail.com)

***Abstract***

*In the context of national economic recovery, the Proud Travel Program in Indonesia has been launched at the end of 2022 to encourage the love of the Indonesian people as domestic tourists visiting domestic destinations, including tourist villages such as Tarumajaya in Kertasari District, Bandung Regency.*

*The development of Tarumajaya Tourism Village has encountered obstacles in terms of the management of existing Community Institutions is still not optimal among them the financial management has not been well organized such as there has been no distribution of compensation to members of the institution, the composition and role of membership in the institution is still unclear, and there is still no official formation of a Tourism Awareness Group regulated in a regulation or regulation of Tourism Villages.*

*This research uses descriptive research method qualitative approach. Participants consisted of: Village Head, Village-Owned Enterprises (BUM Desa) Wa Hyang, Representatives of the Family Welfare Mobilization Team (TP. PKK), Tourism Awareness Group (Pokdarwis), Karang Taruna, religious institution of the Indonesian Ulema Council (MUI) Tarumajaya Village. With observational data collection techniques, interviews, documentation,*

*Based on the research, several recommendations were obtained, namely Structural Training and institutional model making, Making Operational Standards, Making a regulation that regulates pokdarwis, Making the structure or main arrangement of the tasks given, Training and fostering technical knowledge of institution managers, Financial Management Training and Creating a Tourism Village Management Institute (PDW) that will assist in the process of synchronization, coordination, and collaboration.*

*Key words: Community Based Tourism, Community Institutions, Tourism Villages, Village BUM, PKK, Karang Taruna, Pokdarwis, MUI Desa*

### **Abstrak**

Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional telah diluncurkan Program Bangga Berwisata di Indonesia pada akhir tahun 2022 untuk mendorong kecintaan masyarakat Indonesia sebagai wisatawan nusantara mengunjungi destinasi di dalam negeri termasuk desa wisata seperti Tarumajaya di Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung.

Pengembangan Desa Wisata Tarumajaya menemui kendala dalam hal pengelolaan Lembaga Masyarakat yang ada masih belum maksimal diantaranya manajemen keuangannya belum terorganisir dengan baik seperti belum ada pembagian kompensasi kepada anggota lembaga, susunan dan peran keanggotaan dalam lembaga masih belum jelas, dan masih belum terbentuknya Kelompok Sadar Wisata secara resmi yang di atur dalam suatu regulasi atau peraturan Desa Wisata.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif pendekatan kualitatif. Partisipan terdiri dari: Kepala Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Wa Hyang, Perwakilan Tim Penggerak Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK), Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Karang Taruna, lembaga keagamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Desa Tarumajaya. Dengan Teknik pengumpulan data observasi, wawancara. dokumentasi,

Berdasarkan dari penelitian diperoleh beberapa hasil rekomendasi yaitu Pelatihan Struktur dan pembuatan model kelembagaan, Membuat Standard Operasional, Membuat suatu regulasi yang mengatur pokdarwis, Membuat susunan atau tataan pokok tugas yang diberikan, Pelatihan dan pembinaan pengetahuan teknis pengelola lembaga, Pelatihan Manajemen Keuangan dan Membuat lembaga Pengelolaan Desa Wisata (PDW) yang akan membantu dalam proses sinkronisasi, koordinasi, dan kolaborasi.

**Kata Kunci:** Pariwisata Berbasis Masyarakat, Lembaga Kelembagaan Masyarakat, Desa Wisata. BUM, PKK, Karang Taruna, Pokdarwis, MUI Desa

## A. PENDAHULUAN

Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional telah diluncurkan Program Bangga Berwisata di Indonesia pada akhir 2022 untuk mendorong kecintaan masyarakat Indonesia sebagai wisatawan nusantara mengunjungi destinasi di dalam negeri. keterlibatan suatu Lembaga masyarakat atau organisasi sosial dalam pengembangan desa wisata juga sangat penting seperti berdasarkan dari teori mengenai Organisasi sosial menurut Dirdjosisworo (1985) yang mendefinisikan bahwa, ini merupakan suatu wadah pergaulan kelompok yang disusun secara jelas antara para petugas dan tugas-tugasnya yang berhubungan dengan usaha mencapai tujuan tertentu. Desa Wisata Tarumajaya pada awalnya merupakan pemekaran dari Desa Cibeureum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung pada tahun 1979 Hal ini disebabkan jangkauan Desa Cibeureum yang sangat luas dan juga

padat sehingga untuk kemudahan dalam pengelolaan pemerintahan, ekonomi, dan hal lainnya maka dilakukan pemekaran wilayah. Berdasarkan pada Preliminary Research yang dilaksanakan pada awal bulan Januari 2023 hingga akhir Januari 2023 terdapat beberapa masalah yang ditemukan dan menjadi Latar belakang dilakukannya penelitian ini yaitu Lembaga Masyarakat yang ada masih belum maksimal artinya masih terdapat permasalahan seperti dengan cara manajemen keuangannya masih belum terorganisir, susunan dan peran keanggotaan dalam lembaga masih belum jelas, masih belum terbentuknya Kelompok Sadar Wisata secara resmi. Dimana pada dasarnya, pokdarwis inilah kunci penggerak suatu pengembangan destinasi wisata atau pengembangan Desa Wisata Tarumajaya dan juga sebagai penggerak Masyarakat untuk terlibat



dalam pengembangan Desa Wisata. Selain itu juga, Tidak adanya Pokdarwis juga membuat Desa Wisata Tarumajaya pengembangannya tidak maksimal sesuai dengan pada Buku Pedoman Desa Wisata, Masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan Desa Wisata Tarumajaya karena Masyarakat yang ada belum memahami Konsep Desa Wisata seperti Dampak positif untuk Desa Wisata Tarumajaya dan dalam pengambilan keputusan, Keberadaan modal sosial Desa Wisata Tarumajaya masih belum terlihat dalam peningkatan Kapasitas Lembaga masyarakat yang ada dan dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan masih belum Optimal..

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Kelembagaan Masyarakat .**

Dalam penyelesaian suatu permasalahan kelembagaan Menurut Max Weber (2005)

terdapat 9 (Sembilan) cara atau pendekatan (approach) yaitu:

- a. *Hierarchy. A hierarchical structure exists with clearlines of authority.* Soekanto (1983) terdapat 4 (empat) yaitu Struktur Organisasi Fungsional dengan rincian pekerjaan, Struktur Organisasi proyek, dan Struktur Organisasi matriks berdasarkan fungsi, usaha untuk badan usaha dan struktur tim kerja dan Struktur organisasi garis
- b. *Formal rules and regulation governing the organization.* Think Insights (2023) mengenai *Bureaucracy six principles of Max weber, Principles of formal rules and regulations* ini adalah termasuk pada suatu

Dokumen-dokumen di mana aturan dan peraturan ini berada. Termasuk *Manual, directives, handbook, instructions, policies*, dll.

c. *Written Documentation.*

Frontman (2009) mengatakan bahwa dalam organisasi dokumen tertulis itu sendiri bukan hanya instrumen organisasi birokrasi, tetapi juga suatu hal yang merepresentasikan sebuah aturan yang mengikat suatu organisasi, ideologi atau gagasan, pengetahuan, praktik, subjektivitas, tujuan, hasil, dan bahkan organisasi itu sendiri.

d. *Specialization.* Think Insights (2023) mengenai *Bureaucracy six principles of Max weber* pada bagian *Principle of Division of Labour (Specializations)* jika tidak

adanya suatu pembagian kerja, orang ada akan dengan terpaksa melakukan banyak tugas yang tidak mereka kuasai sehingga hal ini menjadi tidak teratur dikarenakan tidak ada kecukupan waktu untuk menyelesaikan semua tugas tersebut.

e. *Technical Knowledge.*

Widyatmika dkk (2019) *Knowledge* terbagi dalam 2 (dua). *Tacit Knowledge ini merupakan suatu segala sesuatu yang dimiliki seseorang seperti judgement, skill, values dan bilief* yang di mana hal ini sulit diformulasikan dan di bagi kepada orang.

f. *Impersonality.* Think Insights (2023) mengenai *Bureaucracy six principles of Max weber* pada bagian *Principle of Impersonality* dikatakan bahwa

suatu birokrasi yang dilakukan harus otonom, impersonal, dan tidak memihak untuk mencapai satu tujuan.

g. *Career Employment. Think Insights* (2023) mengenai *Bureaucracy six principles of Max weber* pada bagian *Principle of Career orientation* dikatakan bahwa suatu birokrasi yang ideal yaitu setiap anggota memiliki keahlian yang unik berkaitan dengan posisi yang akan di berikan.

h. *Salaried Positions and Compensation.* Hasibuan (2007) suatu kompensasi dimaksudkan semua pendapatan dalam bentuk uang, barang langsung maupun tidak langsung yang didapatkan dalam organisasi sebagai sebuah imbalan jasa yang diberikan. Kadarisman (2012) Permasalahan

kompensasi menjadi suatu tantangan yang harus di selesaikan oleh pengelola organisasi atau Lembaga

i. Separation of “Office” and “Private” Income and duties. *The office separate from private life.* Isa, A. A. (2016) terkait dengan *separation of official and private property* mengatakan bahwa pemisahan suatu asset pribadi sendiri dengan yang dimiliki oleh sebuah organisasi dapat membantu menunjukan perbedaan yang signifikan di mana hal ini dapat mengurangi kemungkinan-kemungkinan terjadi suatu permasalahan didalam organisasi penyalahgunaan sebuah dana atau asset dan juga menghindari dari suatu keputusan yang tidak jelas, jadi intinya ini dengan

dilakukannya suatu pemisahan asset hal ini akan meningkatkan keefektifan dan efisiensi sebuah organisasi.

### ***Community Based Tourism***

**(Pariwisata Berbasis**

**Masyarakat)** Suansri (2003),

*Community Based Tourism*

(CBT) atau pariwisata berbasis

masyarakat merupakan jenis

wisata unik yang memiliki

karakteristik yang sama sekali

berbeda dengan wisata masal.

### **Desa dan Desa Wisata**

Menurut Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 6

tahun 2014 tentang desa Bab I

Pasal 1, Desa dapat diartikan

sebagai wilayah yang memiliki

kepentingan untuk mengatur

urusan pemerintah dan

kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan pada

prakasra masyarakat, hak asal

usul, dan atau hak tradisional

yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

### **Pengembangan Desa Wisata**

Sudibya (2018), keberhasilan

dari suatu pengembangan

pariwisata ataupun

pengembangan desa wisata

yaitu terkait dengan tingginya

perolehan dan suport

komunitas lokal.

### **Modal Sosial** Cohen dan

Prusak (2001) memberikan

pemahaman bahwa modal

sosial adalah seperangkat

hubungan aktif antar

individu/komunitas/lembaga

dan semua pola yang muncul

dihubungkan oleh keyakinan

individu/komunitas/lembaga

yang terkait, keterbukaan

individu/komunitas/lembaga,

hubungan kolaboratif yang

dilakukan

individu/komunitas/lembaga yang menyatukan kumpulan untuk bertindak secara kolektif secara efektif

### **Peningkatan Kapasitas**

Whardani (2013) mendefinisikan bahwa peningkatan kapasitas adalah suatu proses dalam melakukan serangkaian perubahan multilevel di dalam individu, kelompok, lembaga dan system dalam rangka penguatan kemampuan penyesuaian individu dan suatu lembaga sehingga dapat tanggap dalam perubahan lingkungan yang ada.

### **C. METODE PENELITIAN**

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian yang deskriptif dengan pendekatan penelitian secara kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu peneliti akan

melihat keadaan secara aktual lapangan dari Desa Wisata Tarumajaya, termasuk berbagai kondisi atau hal lain-lain yang ada.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari dan Melibatkan partisipan yaitu 5 (Lima) Kelembagaan Masyarakat. BUMDesa, Pokdarwis, PKK, Karang Taruna, Lembaga Keagamaan MUI, dan Kepala Desa

Peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi. Peneliti datang ke desa untuk melihat permasalahan yang perlu diselesaikan mudian melakukan wawancara kepada perwakilan lembaga masyarakat untuk mendapatkan data dimaksud. Selain itu data dikumpulkan

dengan melakukan teknik dokumentasi.

### **Analisis Data**

Analisis yang dipakai oleh peneliti dalam Penelitian Proyek Akhir ini yaitu menggunakan model Analysis Interactive yang diperkenalkan oleh Miles, Huberman & Saldana (2014).

Pengujian keabsahan data menurut Moleong (2004) terdapat beberapa cara namun dalam pengujian keabsahan data dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan Triangulasi dimana peneliti memverifikasi sebuah data yang telah diperoleh dari sumber dengan menggunakan berbagai cara Observasi, Wawancara atau diskusi dan Dokumentasi.

### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Desa Tarumajaya merupakan satu bagian pemekaran dari desa Ciberieum Kecamatan Kertasari

pada tahun 1979. Dengan alasan luasan cakupan wilayah desa sangat luas dimana untuk memudahkan rentang kendali dalam pengaturan pemerintah, ekonomi dan lainnya maka desa ini dimekarkan menjadi 2 (dua) desa yaitu Desa Ciberieum dan Desa Tarumajaya. 1500 -1650 mdpl dengan kondisi iklim rata-rata suhu harian 15-20 derajat celcius dan memiliki 6 bulan musim hujan dalam 1 tahun. Luas Desa Tarumajaya yaitu 2743 Ha kemudian untuk jarak dari desa ke ibukota kecamatan menempuh jarak 5 km untuk ke ibukota kabupaten Soreang dengan menempuh jarak 58 km.

### **E. Eksistensi Lembaga**

#### **Masyarakat (Sejarah Terbentuknya Lembaga)**

- a. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Wa Hyang Tarumajaya

Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa ini dimulai pada tahun 2016 dimana dengan nama “Usaha Kita Bersama 1979” didirikannya BUM DESA ini, ke depannya diharapkan dapat mampu memanfaatkan potensi dan asset Desa. Pada tanggal 1 Maret 2021 BUM Desa “Usaha Kita Bersama 1979” ada suatu pergantian pengurus sekaligus pergantian sebuah nama menjadi “BUM Desa Wa Hyang Tarumajaya”.

b. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)

Terbentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dikarenakan kebutuhan Desa Wisata Tarumajaya yang dulunya dikelola oleh kompepar (Kelompok Penggerak Pariwisata) dan

pokdarwis itu sendiri terbentuk pada tahun 2021.

c. Karang Taruna desa Wisata Tarumajaya

Karang Taruna Desa Tarumajaya berdiri pada tanggal 18 Juni 2019 berdasarkan pada hasil temu karya Karang Taruna yang menghasilkan kepengurusan Karang Taruna Desa Tarumajaya Masa bakti 2020-2025 yang melibatkan seluruh lapisan pemuda perwakilan tiap RW, perangkat desa dan seluruh lapisan Lembaga Desa. Selang beberapa bulan kemudian terbentuklah beberapa Karang Taruna unit baru di antaranya Bakti Jaya, Galur 7, sa Lodaya, Talagawayang, Kartun6218, karta Siliwangi, dan karta Sawarna Ranca yang sudah

terlantik, mewakili lokus dusunnya masing-masing

d. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Desa Tarumajaya

Terbentuknya MUI Desa Tarumajaya, sudah ada sejak awal mula berdirinya Desa Tarumajaya dan Dalam perjalanannya berkembang sesuai dengan perkembangan desa.

e. TP. PKK Desa Tarumajaya

Terbentuk berdasarkan pada musyawarah Kepala Desa dan Ibu-Ibu Perwakilan Kader Posyandu pada tanggal 19 November 2019 dan terbentuk resmi pada 12 Desember 2019

### **Sinkronisasi Lembaga**

#### **Masyarakat**

Sinkronisasi antar lembaga masyarakat yaitu BUM Desa Wa Hyang Tarumajaya,

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Majelis Ulama Indonesia (MUI) , Tim Penggerak PKK Desa Tarumajaya memiliki nilai yang baik dalam hubungannya dengan Kelembagaan Masyarakat yang ada di Desa dikarenakan ke-5 lembaga ini selalu berkerjasama untuk mengembangkan Bersama Desa Wisata Tarumajaya dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan sehingga kegiatan desa dapat berjalan dengan baik.

### **Hubungan Lembaga**

#### **Masyarakat dengan**

#### **Masyarakat**

Hubungan BUM Desa Wa Hyang dengan masyarakat sampai saat ini dapat diterima dimaksudkan bahwa masyarakat sudah mulai



memanfaatkan lembaga BUM Desa dengan cara menitipkan hasil usaha kepada unit usaha pemasaran di BUM Desa dan mereka juga sudah mulai memanfaatkan BUM Desa untuk memasarkan *homestay*. Hubungan Pokdarwis dengan masyarakat lokal tentunya memiliki sebuah tantangan salah satunya kesadaran masyarakat terkait desa wisata “Sumber Daya Manusia” salah satu peran penting bagi POKDARWIS untuk melakukan pembinaan. Hubungan Karang Taruna Desa Tarumajaya dengan masyarakat yang ada di desa. Mereka dapat menerima kehadiran Karang Taruna dimana kelompok masyarakat pemuda dan remaja memberikan partisipasi didalam sosialisasi

pengembangan desa wisata, pembuatan konten digital, dan memposting berbagai hal terkait dengan Desa Wisata Tarumajaya. Hubungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan masyarakat terjalin sangat baik dimaksudkan bahwa masyarakat dengan MUI besinergi dalam berbagai kegiatan pembinaan Rohani dan mental spiritual masyarakat. MUI mempunyai jadwal tersendiri secara berkala mengadakan pembinaan ke setiap masjid di wilayah desa dalam penguatan mental dikarenakan masyarakat Desa Tarumajaya memiliki tingkat persaudaraan dan persatuan kuat.

Hubungan TP.PKK Desa Tarumajaya dengan masyarakat yang ada diterima

dengan baik artinya berbagai aktifitas PKK dalam hal ini pelaksanaan 10 program PKK didukung oleh kelompok perempuan (Ibu-ibu dan keluarga).

### **Susunan Lembaga Masyarakat (*Hierarchy*)**

#### a. Susunan Pengurus BUM

##### Desa Wa Hyang

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) terlihat bahwa struktur lembaga sudah lengkap dimana terdiri dari Penasihat yaitu Kepala Desa Tarumajaya didukung oleh Badan Pengawas BUM Desa Wa Hyang Tarumajaya, Direktur BUM Desa Wa Hyang, Sekertaris BUM Desa Wa Hyang, Bendahara BUM Desa Wa Hyang, Manager beserta dengan anggota BUM Desa Wa

Hyang Tarumajaya, dan terakhir Unit Usaha BUM Desa Wa Hyang Tarumajaya

b. Susunan Pengurus Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dalam hal ini Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Tarumajaya masih belum memiliki suatu pembentukan susunan lembaga pokdarwis tetapi sudah dibicarakan dengan Pemerintahan Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sehingga dalam proses pembentukan susunan struktur lembaga masih membutuhkan suatu tataan kepengurusan seperti contohnya dikarenakan Pokdarwis masih belum memiliki susunan keanggotaan yang cukup jelas dan *detail*.

c. Susunan Pengurus Karang Taruna

Susunan Karang terlihat bahwa struktur lembaga sudah lengkap dimana terdiri dari Pembina umum yaitu Kepala Desa Tarumajaya didukung oleh pembina fungsional, pembina teknis dengan jumlah terdapat 4 (empat) orang. Kemudian itu Ketua Karang Trauna, didukung oleh Ketua Harian, Sekertaris, Bendahara, serta seksi-seksi yang sudah terbagi dalam 7 (tujuh) bagian yaitu Pendidikan dan pelatihan, Kelompok usaha bersama, Kerohanian, Olahraga dan seni budaya, Lingkungan hidup, Humas dan uks Kesehatan, dan terakhir Kesejahteraan sosial

d. Susunan Pengurus Majelis Ulama Indonesia Desa Tarumajaya (MUI)

Struktur lembaga sudah lengkap dimana terdiri dari Penasihat yaitu Ketuaitu Kepala Desa Tarumajaya didukung oleh Anggota, kemudian itu ada Dewan Pimpinan Harian terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua, Sekertaris, Bendahara, serta Komisi-komis yang terbagi dalam 5 bagian yaitu Fatwa, Ukhuwwah Islamiyah, Dakwah dan pengembangan masyarakat, Perempuan remaja dan keluarga, dan Seni budaya islam.

e. Susunan Pengurus PKK

Struktur lembaga sudah lengkap dimana terdiri dari Badan Penyatuan yaitu Kepala Desa Tarumajaya, Ketua dari PKK, Sekertaris, Bendahara. Didukung oleh 4 bagian POKJA yaitu Gotong Royong, Pendidikan dan keterampilan, Pangan dan sandang, Kesehatan dan kelestarian lingkungan.

Dari masing-masing POKJA tersebut memiliki Ketua, Sekretaris, dan anggota berjumlah 1-2 orang.

**Aturan Formal dan Regulasi yang berlaku (*Formal Rules and regulations*)**

Ke-5 lembaga masyarakat yang ada yaitu Badan Usaha Milik Desa, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Karang Taruna, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga hanya 4 yang sudah memiliki suatu regulasi atau landasana aturan yang mengikat secara jelas sedangkan yang masih belum memiliki suatu regulasi yang jelas yaitu kelompok sadar wisata (Pokdarwis)

**Dokumentasi tertulis (*Documentation Written*)**

Ke-5 lembaga masyarakat yang ada yaitu Badan Usaha Milik Desa, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Karang Taruna, Majelis Ulama

Indonesia (MUI), Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga hanya 4 yang sudah memiliki aturan tertulis terkait dengan suatu tugas dari masing-masing Lembaga yang ada. Sedangkan yang masih belum memiliki dokumen tertulis ini yaitu Kelompok Sadar Wisata.

**Spesialisasi (*Specialization*)**

Ke-5 lembaga masyarakat yang ada yaitu Badan Usaha Milik Desa, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Karang Taruna, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga hanya 4 yang sudah memiliki pembagian tugas sesuai dan juga tertuang di dalam ART (Anggaran Rumah Tangga) dan suatu SOP (Standar Operasional Prosedur). Kelompok Sadar Wisata sendiri masih belum memiliki hal tersebut.

**Pengetahuan Teknis (*Technical knowledge*)**

Ke-5 lembaga masyarakat masih belum memiliki klasifikasi yang sesuai dikarenakan seperti rata-rata anggota yang terlibat didalam BUMDesa tidak memiliki pengalaman khusus sama seperti dengan Karang taruna disesuaikan dengan Latar belakang dan kebiasaan anggota.

#### **Impersonalitas (*Impersonality*)**

Ke-5 lembaga masyarakat yang ada yaitu Badan Usaha Milik Desa, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Karang Taruna, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga sudah mengikuti prosedur yang ada dan juga sesuai dengan kesepakatan yang diberikan dari pemerintahan desa seperti contohnya Aturan yang berlaku di Desa Wisata Tarumajaya.

#### **Pengembangan karir Lembaga Masyarakat (*Career Employment*)**

Peningkatan karir Ke-4 lembaga masyarakat yang ada yaitu Badan Usaha Milik Desa, Karang Taruna, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga sudah dilakukan dengan cara seperti adanya suatu penilaian kinerja anggota, performa kerja anggota, dan loyalitas terhadap Lembaga. Namun untuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) masih belum ada karena SDM yang masih kurang dalam pengetahuan.

#### **Kompensasi (*Salary*)**

Ke-4 lembaga masyarakat yang ada yaitu Badan Usaha Milik Desa, Karang Taruna, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan sudah memiliki kompensasi yang diberikan kepada anggota tetapi, belum sesuai dengan minimal UMR. Hanya seperti penggantian uang transportasi tidak hanya itu saja kompensasi secara non-material juga diberikan yaitu naik

posisi jabatan. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) masih belum adanya sebuah kompensasi

### **Ketersediaan Kantor Lembaga**

**Masyarakat (*Separation of "Official" and "Private" work space*)**

Ke-4 lembaga masyarakat yang ada yaitu Badan Usaha Milik Desa, Karang Taruna, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan sudah memiliki suatu ketersediaan Kantor Lembaga

### **Pembahasan**

**Modal Sosial dalam Lembaga Masyarakat**

Modal sosial dari ke-5 (lima) lembaga masyarakat yang ada di Desa Tarumajaya cukup terlihat dari sinkronisasi antara 1 (satu) lembaga masyarakat dengan lembaga lainnya. Sinkronisasi ini disatukan

oleh suatu visi dan misi yang sama yaitu membangun Desa Wisata Tarumajaya kemudian itu juga disatukan oleh pola suatu Kepercayaan, keyakinan, keterbukaan dan moral bersama yang menyatukan lembaga yang ada untuk bertindak secara kolektif atau berkerjasama secara efektif atau terarah pada tujuan Bersama.

### **Kapasitas Lembaga Masyarakat Desa Tarumajaya**

Hubungan antara kelembagaan BUM DESA Wa Hyang Tarumajaya, Majelis Ulama Indonesia, Pokdarwis, Karang Taruna, TP.PKK sangat erat juga saling mendukung satu sama lain dan juga erat dalam hal untuk mengembangkan Desa Wisata terlihat dari nilai Gotong-Royong yang di raih yaitu sebesar 6.8 Milyar. terkait hubungan ke 5 lembaga ini dengan masyarakat lokal yang ada di Desa dikatakan sejauh ini kehadiran Desa

Wisata Tarumajaya dapat diterima baik oleh masyarakat dengan antusias dalam mendorong kelancaran suatu

a. Manajemen kelembagaan Desa Wisata. Kelembagaan dan pola hubungan antara lembaga desa dengan Lembaga kemasyarakatan desa dalam konteks pengelolaan Desa Wisata Tarumajaya dikoordinasikan oleh Pengelola Desa Wisata.

b. Manajemen Keuangan Desa Wisata. Pengelolaan Keuangan desa wisata dilaksanakan oleh Pokdarwis

aktifitas Desa Wisata seperti yang dituliskan diatas nilai Gotong-Royong yang tinggi.

di masing-masing lokasi wisata dibawah koordinasi Unit Usaha Wisata BUM Desa Wa Hyang Desa Tarumajaya. Sehingga pendapatan desa dari retribusi di masing-masing lokasi wisata (Pokdarwis Situ Cisanti, Pokdarwis Bukit Paesan, Pokdarwis Camping Ground dan Pokdarwis Bukit Pinus) dikelola oleh Unit Usaha Wisata BUM Desa

## Peningkatan Kapasitas Lembaga

NO	ASPEK	PEMBAHASAN	PENINGKATAN KAPASITAS
1	Hierarchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Susunan Anggota Lembaga Masyarakat Belum Lengkap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat pelatihan tentang manajemen organisasi, lembaga, keuangan, dan sdm</li> </ul>
2	Written documentation	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum semua lembaga masyarakat memiliki dokumen tertulis mengenai pembagian tugas dan peran lembaga</li> <li>Belum semua memiliki dokumen tertulis tentang pengaturan tugas dan dukungan terhadap pengembangan desa wisata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat atau melaksanakan pelatihan penulisan terkait dengan pembagian tugas lembaga masyarakat</li> <li>Membuat pelatihan jurnalistik bagi pengurus dan anggota lembaga masyarakat</li> </ul>
3	Formal Rules and Regulations	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulasi belum tersedia didalam lembaga masyarakat yang diteliti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan musyawara untuk merencanakan pembuatan regulasi seperti peraturan desa (Perdes), Keputusan Kepala Desa tentang dukungan lembaga masyarakat terhadap pengembangan desa wisata tarumajaya</li> </ul>
4	Specialization	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum terdapat pembagian kerja secara spesifik antara anggota dan pengurus di setiap lembaga yang diteliti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat pelatihan terkait sistem operasional prosedur setiap unit kepengurusan</li> </ul>
5	Technical Knowledge	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kualifikasi pengetahuan masih secara umum terhadap desa wisata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat pelatihan teknis tentang -pariwisata</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Lembaga masyarakat belajar secara otodidak (Belajar sendiri) dalam mengembangkan desa wisata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat pelatihan teknis tentang pengembangan desa wisata</li> <li>Membuat pelatihan teknis tentang manajemen pariwisata yang terkait</li> <li>Melakukan kolaborasi atau bekerjasama dengan pihak eksternal contoh dengan politeknik pariwisata nini Bandung, Swasta (Cooperate Social Responsibility), Media (Dukung digitalisasi), Masyarakat (Sebagai subjek dan obyek pengembangan desa wisata), dan pemerintah (Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Pusat)</li> </ul>
6	Impersonality	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum sepenuhnya lembaga masyarakat yang diteliti mengikuti suatu ketentuan yang ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan sosialisasi mengenai prosedur dan ketentuan yang sebenarnya terkait pengembangan desa wisata</li> <li>Membuat pelatihan tentang prosedur pengembangan desa wisata dari rintisan hingga berkembang</li> </ul>
7	Peningkatan Karir (Career Employment)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum sepenuhnya lembaga masyarakat yang diteliti memiliki kompetensi dalam mengembangkan desa wisata</li> <li>Belum memiliki program pengembangan karir dari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat pelatihan peningkatan kompetensi disemua lembaga masyarakat yang diteliti untuk mengembangkan desa wisata</li> <li>Membuat pola atau rencana pengembangan karir lembaga masyarakat</li> </ul>

		pengurus dan anggota lembaga masyarakat	terutama dalam aspek pengembangan desa wisata <ul style="list-style-type: none"> <li>Memperkuat hubungan antara lembaga masyarakat dengan pembagian urusan dan kewenangan yang sesuai</li> </ul>
8	Kompensasi (Salaried Positions)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum ada penetapan terkait dengan kompensasi yang diberikan kepada lembaga masyarakat yang diteliti baik kepada pengurus maupun anggota secara khusus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Upaya membuat atau melaksanakan pelatihan manajemen keuangan</li> <li>Membuat rencana pemberian kompensasi (Pengajian) yang sepadan dengan tugas dan kerja diberikan dalam rangka pengembangan desa wisata</li> </ul>
9	Kantor Lembaga (Seperation of official and private income also duties)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum semua memiliki kantor dalam bentuk ruang secara terpisah</li> <li>Belum memiliki kelengkapan saran dan prasarana di kantor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat pengembangan kantor berbasis digital</li> <li>Membuat pelatihan manajemen perkantoran dengan menerapkan digitalisasi atau memanfaatkan kemampuan Teknologi Informasi Komunikasi</li> <li>Melengkapi saran prasarana perkantoran</li> </ul>

## Masyarakat di Desa Wisata Tarumajaya

### F. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### Simpulan

- Desa Tarumajaya telah siap untuk mengembangkan desa wisata secara professional, mengingat Desa Wisata telah termasuk dalam

kategori Desa Wisata Berkembang fase awal berdasarkan penilaian Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2022. Kategori tersebut merupakan wujud apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Bandung berdasarkan sejumlah standar kriteria yang ditetapkan. Penetapan



tersebut membuka peluang bagi Desa Tarumajaya untuk mendapatkan dukungan program dan kegiatan dari berbagai pihak, baik dari Pemerintah Kabupaten melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD terkait) maupun investasi dunia usaha. Secara kelembagaan, Desa Tarumajaya berpotensi untuk mengembangkan diri sebagai desa wisata maju, dengan sejumlah potensi yang dimiliki, antara lain:

2. Modal sosial yang kuat diwujudkan dengan hubungan kekerabatan antar warga dan solidaritas sosial yang tinggi untuk melaksanakan program-program layanan dasar dan kelestarian lingkungan seperti Kelompok Pemelihara Sistem Penyediaan Air Minum (KP SPAM) yang dikelola secara mandiri dari sumber-sumber mata air untuk disalurkan ke warga desa yang membutuhkan dan inisiasi untuk mengembangkan potensi wisata alam Pegunungan Wah Yang secara gotong royong

- a. Lembaga-lembaga desa yang aktif dalam pembangunan desa yang digerakkan oleh sejumlah sumberdaya manusia yang memiliki atensi besar dalam pengelolaan desa wisata berbasis potensi desa, antara lain BUM Desa, PKK, Karang Taruna, lembaga agama dan pionir-pionir Pokdarwis meskipun belum memiliki anggota.
- b. Pola hubungan antar lembaga kemasyarakatan desa cukup solid, interaktif dan menghasilkan rasa saling percaya (*trust*) sehingga dalam pelaksanaan pembangunan lembaga-lembaga tersebut selalu saling membantu dan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan (*mutualism*) penuh tanggung jawab (*resiprositas*), misalnya pada

saat menghadapi pandemic Covid-19, pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT), sembako, bantuan sosial maupun program literasi desa yang membuahkan hasil berupa penghargaan pemanfaatan perpustakaan terbaik tingkat kabupaten Bandung sebagai penanda terrealisasinya program literasi desa.

- c. Lembaga-lembaga di Desa Tarumajaya telah terintegrasi dan bahu-membahu, membantu mempromosikan potensi Desa Tarumajaya termasuk program-program wisata kepada masyarakat.
- d. Potensi Sumberdaya alam yang telah dirintis untuk dikembangkan dengan pembangunan amenitas antara lain di lokasi wisata Bukit Paesan, Wisata Air Situ

Cisanti di kilometer 0 Sungai Citarum, Wisata Bukit Pinus Pakawa, Wisata rintisan Curug (Air Terjun), Wisata Camping Ground AGV dan outbound, serta wisata agro petik strawberry.

## Rekomendasi

Kelembagaan yang ada di Desa Wisata Tarumajaya sebaiknya dikoordinasikan dalam satu lembaga yaitu Pengelolaan Desa Wisata (PDW). Dimana



1. Gagasan pembentukan kelembagaan Pengelola Desa Wisata (PDW) merupakan ide brilian untuk membangun kolaborasi antar lembaga dalam manajemen desa wisata komprehensif yang perlu dilegalkan dalam Peraturan Desa agar dapat segera direalisasikan.
2. Perlu peningkatan kapasitas dengan cara melakukan suatu pelatihan sumberdaya

kelembagaan ini akan membantu dalam proses sinkronisasi, koordinasi, dan kolaborasi antar kelembagaan yang ada di Desa Wisata Tarumajaya. sehingga permasalahan yang terdapat di Kelembagaan dapat diselesaikan dengan mudah terorganisir dengan baik dan juga program kegiatan Desa Wisata dapat berjalans secara Optimal.

manusia terkait dengan skills yang diberikan langsung oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung bagi para pionir Pokdarwis yang masih bekerja sendiri-sendiri dalam mengelola potensi dan lokasi wisata karena belum memiliki anggota hal ini guna untuk meningkatkan suatu kemampuan yang dimiliki mereka selain itu saja. Perekrutan anggota menjadi

prasyarat mutlak dalam pembentukan kelompok, sehingga tugas dan fungsi dapat dibagi dalam job deskripsi secara lebih baik sehingga pengembangan desa wisata pada destinasi yang ditentukan dapat bergerak lebih cepat.

3. Revitalisasi BUM Desa melalui peningkatan kapasitas pengelolaan desa wisata pada unit usaha wisata desa, baik aspek afektif, kognitif, psychomotoric (skill), dalam bidang/program : 1) Manajemen Destinasi wisata, 2) Manajemen Keuangan Destinasi Wisata, 3) Pembangunan Amenitas didukung oleh Pemerintah Daerah dan Investor dari Dunia Usaha dan

Akademisi, 4) Pengembangan jejaring kemitraan dengan Pemda, Akademisi dan Dunia Usaha, 5) Sumber Daya Manusia (SDM), 6) promosi destinasi wisata, dan 7) branding destinasi wisata beserta produk-produk

4. Rekomendasi untuk kelembagaan sendiri berdasarkan dari 9 (Sembilan) Pendekatan (*Approach*) dalam menyelesaikan suatu permasalahan di dalam kelembagaan oleh Max Weber (2005) yaitu lembaga Masyarakat sebaiknya melaksanakan suatu Pelatihan mengenai Struktur Lembaga, Pelatihan dan Pembuatan Model Kelembagaan

## DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Wirdayanti *et al*, (2021) Buku Pedoman Desa Wisata. Kolaborasi Kemenko PMK, Kemenko Marinvest, Kemendagri, Kominfo, Kemendesa PDTT, Kemen KKP, Kemenparekraf dan Kemen PPPA, Jakarta, Indonesia
- Arintoko, A., Ahmad, A. A., Gunawan, D. S., & Supadi, S. (2020). Community-based tourism village development strategies: A case of Borobudur tourism village area, Indonesia. *Geo Journal of Tourism and Geosites*, 29(2), 398-413.
- Candra, F. U. (2021). Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Tunggul Ulung Sebagai Sarana Penguat Ekonomi Desa. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(9), 2019-2024.
- Chaskin, R. (2001). *Building Community capacity*, New York: Walter de Gruyter.
- Cohen, E. (2010). Tourism, leisure and authenticity. *Tourism recreation research*, 35(1), 67-73.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2011). *The Sage handbook of qualitative research*. sage.
- Dewi, M. H. U. (2013). Pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal di Desa Wisata Jatiluwih
- Giampiccoli, A., & Mtapuri, O. (2021). From conventional to alternative tourism: Rebalancing tourism towards a community-based tourism approach in Hanoi,

- Vietnam. *Social Sciences*, 10(5), 176.
- Hasyim Hasanah. (2005). Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu social): Parker.
- Hilal, A. H., & Alabri, S. S. (2013). Using NVivo for data analysis in qualitative research. *International interdisciplinary journal of education*, 2(2), 181-186.
- Karimah, S., & Hastuti, H. (2019). The Development Strategy Of Lake Kelimutu Tourist Attraction In Ende Regency. *Geosfera Indonesia*, 4(2), 188-200.
- Dewi, M. H. U. (2013). Pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Jurnal Kawistara*, 3(2).
- Miles, M. B., & Huberman, M. A. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2nd Edition)*. London: Sage Publications.
- M. Pakurar, J. Olah (2008). *Definition of Rural Tourism and Its Characteristic in the northern great plain region*,
- Mtapuri, O., & Giampiccoli, A. (2016). Towards a comprehensive model of community-based tourism development. *South African Geographical Journal= Suid-Afrikaanse Geografiese Tydskrif*, 98(1), 154-168.
- Mowforth, M., Charlton, C., & Munt, I. (2007). *Tourism and responsibility: Perspectives*

- from Latin America and the Caribbean*. Routledge.
- Moleong, L. J., & Edisi, P. R. R. B. (2004). *Metodelogi penelitian*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan usaha Milik Desa
- Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna
- Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkerlanjutan
- Sharpley, R., & Roberts, L. (2004). Rural tourism—10 years on. *International Journal of tourism research*, 6(3), 119-124.
- Silalahi, Ulber (2009). *Metode Penelitian Sosial*
- Stolley, Kathy S. (2005), *The basics of sociology Includes bibliographical references and index*, Greenwood Press, Westport Unites States of America
- Suansri, Potjana, (2003). *Community Based Tourism Handbook*. Thailand: REST Project.
- Surat Keputusan Kepala Desa Tarumajaya nomor 145/01/SKEP/DS.2004/I/2020
- Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kertasari nomor 001/MUI.Kec/2021. Tanggal 28 Mei 2021.
- Undang-Undang RI Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa

Wiliam, W. (1986). Triangulation is  
Qualitative Cross-Validation.

Zielinski, S., Jeong, Y., Kim, S. I., &  
B. Milanés, C. (2020). Why  
community-based tourism and

rural tourism in developing and  
developed nations are treated  
differently? A  
review. *Sustainability*, 12(15)





## DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Wirdayanti *et al*, (2021) Buku Pedoman Desa Wisata. Kolaborasi Kemenko PMK, Kemenko Marinvest, Kemendagri, Kominfo, Kemendesa PDTT, Kemen KKP, Kemenparekraf dan Kemen PPPA, Jakarta, Indonesia
- Arintoko, A., Ahmad, A. A., Gunawan, D. S., & Supadi, S. (2020). Community-based tourism village development strategies: A case of Borobudur tourism village area, Indonesia. *Geo Journal of Tourism and Geosites*, 29(2), 398-413.
- Bhandari, H., & Yasunobu, K. (2009). What is social capital? A comprehensive review of the concept. *Asian Journal of Social Science*, 37(3), 480-510.
- Candra, F. U. (2021). Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Tunggul Ulung Sebagai Sarana Penguat Ekonomi Desa. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(9), 2019-2024.
- Chaskin, R (2001) *Building Community capacity*, New York: *Walter de Gruyter*.
- Cohen, E. (2010). Tourism, leisure and authenticity. *Tourism recreation research*, 35(1), 67-73.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2011). *The Sage handbook of qualitative research*. sage.
- Dewi, M. H. U. (2013). Pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Jurnal Kawistara*, 3(2).

- Giampiccoli, A., & Mtapuri, O. (2021). From conventional to alternative tourism: Rebalancing tourism towards a community-based tourism approach in Hanoi, Vietnam. *Social Sciences*, 10(5), 176.
- Hasyim Hasanah. (2005). Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu social): Parker.
- Herdiana, D. (2019). Peran masyarakat dalam pengembangan desa wisata berbasis masyarakat. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 6(1), 63-86.
- Hilal, A. H., & Alabri, S. S. (2013). Using NVivo for data analysis in qualitative research. *International interdisciplinary journal of education*, 2(2), 181-186.
- Karimah, S., & Hastuti, H. (2019). The Development Strategy Of Lake Kelimutu Tourist Attraction In Ende Regency. *Geosfera Indonesia*, 4(2), 188-200.
- Dewi, M. H. U. (2013). Pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Jurnal Kawistara*, 3(2).
- Miles, M. B., & Huberman, M. A. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2nd Edition)*. London: Sage Publications.
- M. Pakurar, J. Olah (2008). *Definition of Rural Tourism and Its Characteristic in the northern great plain region*,
- Mtapuri, O., & Giampiccoli, A. (2016). Towards a comprehensive model of community-based tourism development. *South African Geographical Journal= Suid-Afrikaanse Geografiese Tydskrif*, 98(1), 154-168.

- Mita Rosaliza (2015) Wawancara, sebuah interaksi komunikasi dalam penelitian kualitatif, *Ilmu Budaya* Vol 11 No 2
- Mowforth, M., Charlton, C., & Munt, I. (2007). *Tourism and responsibility: Perspectives from Latin America and the Caribbean*. Routledge.
- Moleong, L. J., & Edisi, P. R. R. B. (2004). Metodologi penelitian. *Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya*.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan usaha Milik Desa
- Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna
- Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkerlanjutan
- Salazar, N. B. (2011). *The power of imagination in transnational mobilities. Identities*, 18(6), 576-598.
- Sari, D. K. I., & Haryanto, S. (2021). *A Sociopragmatics Analysis Of Condolences For The Late Of Chadwick Boseman Used By Instagram Users* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Sharpley, R., & Roberts, L. (2004). Rural tourism—10 years on. *International Journal of tourism research*, 6(3), 119-124.
- Silalahi, Ulber (2009). *Metode Penelitian Sosial*
- Stolley, Kathy S. (2005), *The basics of sociology Includes bibliographical references and index*, Greenwood Press, Westport Unites States of America

Suansri, Potjana, (2003). *Community Based Tourism Handbook*. Thailand: REST Project.

Sudibya, B. (2018). Wisata Desa dan Desa Wisata. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 1(1), 22-26.

Surat Keputusan Kepala Desa Tarumajaya nomor 145/01/SKEP/DS.2004/I/2020

Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kertasari nomor 001/MUI.Kec/2021. Tanggal 28 Mei 2021.

Undang-Undang RI Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa

Wahyudi, T. (2018). Rancang Bangun Sistem Informasi Pariwisata Kabupaten Banyumas. *SNIT 2018*, 1(1), 7-14.

Wiliam, W. (1986). Triangulation is Qualitative Cross-Validation.

Zielinski, S., Jeong, Y., Kim, S. I., & B. Milanés, C. (2020). Why community-based tourism and rural tourism in developing and developed nations are treated differently? A review. *Sustainability*, 12(15), 5938.